



Peran Transformasi Kesadaran Kewargaan di Era Globalisasi Digital dalam Membangun Masyarakat Toleran (Studi Kasus Respons terhadap Isu Rasisme di Media Sosial)

Salma Miftakhul Jannah^{1*}, Peni Kunthi Hermawati², Heru Sujaryanto³, Muhammad Hendri Nuryadi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail Koresponden: salma.mj009@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to explore how the transformation of civic consciousness in the digital era plays a role in shaping a more tolerant society, especially in responding to the issue of racism that is developing on social media. Using a qualitative approach through a case study method, this study analyzes various forms of digital citizen participation in dealing with discriminatory content. Data collection techniques were carried out through digital social media content analysis, literature review, and thematic interpretation based on two main theories, namely Digital Citizenship (Ribble, 2011) and Critical Consciousness (Freire, 1970). The results of the study found five main things: (1) the emergence of educational and emancipatory counter-narratives; (2) the transformation of individual expression into a collective movement through digital activism; (3) the important role of digital figures and alternative media in shaping tolerant public opinion; (4) the diversity of public responses, from progressive to regressive; and (5) structural challenges in the form of opinion polarization, the spread of disinformation, and the echo chamber effect. This study concludes that although social media is a complex and challenging space, it still has great potential as a vehicle for civic education and a tool for social transformation towards a society that values diversity and upholds the values of justice.*

Keywords: *Globalization, Racism, Social Media, Social Tolerance, Transformation of Civic Awareness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana transformasi kesadaran kewargaan di era digital berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran, khususnya dalam merespons isu rasisme yang berkembang di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, penelitian ini menganalisis berbagai bentuk partisipasi warga digital dalam menghadapi konten diskriminatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten media sosial, kajian literatur, dan interpretasi tematik berdasarkan dua teori utama, yaitu *Digital Citizenship* (Ribble, 2011) dan *Critical Consciousness* (Freire, 1970). Hasil penelitian menemukan lima hal utama: (1) kemunculan narasi tandingan yang edukatif dan bersifat emansipatoris; (2) transformasi ekspresi individu menjadi gerakan kolektif melalui aktivisme digital; (3) peran penting figur digital dan media alternatif dalam membentuk opini publik yang toleran; (4) adanya keragaman respons publik, dari yang progresif hingga regresif; dan (5) tantangan struktural berupa polarisasi opini, penyebaran disinformasi, dan efek *echo chamber*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun media sosial merupakan ruang yang kompleks dan penuh tantangan, namun tetap memiliki potensi besar sebagai wahana pendidikan kewargaan serta alat transformasi sosial menuju masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Globalisasi, Rasisme, Media Sosial, Toleransi Sosial, Transformasi Kesadaran Sipil

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal luas karena kekayaan dan keberagaman budayanya. Dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini dihuni oleh ratusan kelompok etnis yang memiliki bahasa, adat, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut menjadi identitas khas Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural dan majemuk. Lebih dari sekadar kenyataan geografis dan demografis, keberagaman ini adalah anugerah yang semestinya dirawat dan dijadikan

fondasi bagi kehidupan berbangsa yang harmonis. Dalam semangat kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, perbedaan seharusnya tidak dijadikan sumber perpecahan, melainkan diterima sebagai kekayaan yang memperkaya perspektif dan cara hidup. Masyarakat Indonesia didorong untuk bersikap terbuka, toleran, dan menghormati satu sama lain sebagai bagian dari proses membangun peradaban yang damai dan berkeadaban. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan mendesak. Pendidikan yang menanamkan nilai penghargaan terhadap perbedaan akan mendorong lahirnya generasi yang terbuka terhadap keberagaman dan mampu membina kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam secara sosial dan budaya. Namun demikian, realitas sosial yang dihadapi bangsa Indonesia tidak lagi bisa dilepaskan dari pengaruh kuat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Kita saat ini hidup dalam era digital yang ditandai oleh keterhubungan global yang semakin intensif. Arus informasi mengalir cepat dan tanpa batas, menjangkau berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, budaya, hingga cara manusia berinteraksi dalam ruang sosial dan politik. Dunia maya menjadi perpanjangan dari ruang fisik, dan dalam ruang inilah masyarakat kini semakin aktif menyuarakan pendapat serta mengambil peran dalam dinamika kewargaan. Transformasi digital tersebut tidak hanya membawa dampak positif dalam memperluas akses terhadap informasi dan mempercepat komunikasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam kehidupan bernegara. Kewargaan tidak lagi hanya terwujud dalam bentuk partisipasi fisik di ruang publik, seperti pemilu atau diskusi tatap muka, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan digital yang menuntut tanggung jawab moral dan etika yang sama. Dalam konteks ini, kesadaran kewargaan mengalami pergeseran yang signifikan: dari sekadar kepatuhan terhadap aturan formal, menuju kesadaran reflektif yang melibatkan pemikiran kritis, empati sosial, serta kemampuan membaca dan memahami persoalan lintas batas budaya dan negara. Media sosial menjadi contoh nyata dari medan baru kewargaan digital. Platform seperti X (dulu Twitter), Instagram, TikTok, hingga Facebook telah menjelma menjadi ruang publik virtual tempat masyarakat bertukar ide, memperjuangkan nilai, hingga menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial.

Melalui media sosial, individu memiliki kebebasan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam wacana publik. Sayangnya, ruang ini juga sarat dengan tantangan, seperti berkembangnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta maraknya diskriminasi berbasis identitas. Salah satu isu yang semakin mencuat di media sosial Indonesia adalah rasisme. Fenomena ini menegaskan bahwa ruang digital tidak selalu netral, melainkan dapat mereproduksi ketidakadilan sosial yang berakar pada stereotip dan prasangka etnis.

Beberapa kasus viral, seperti tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, atau komentar diskriminatif terhadap figur publik dari etnis minoritas, memperlihatkan betapa media sosial bisa menjadi tempat subur bagi berkembangnya intoleransi. Konten bermuatan kebencian ini menyebar dengan cepat dan kerap kali mendapatkan perhatian luas tanpa disertai pemahaman kritis. Data dari platform digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah konten yang mengandung ujaran kebencian. Misalnya, menurut Facebook pada tahun 2020, terdapat lebih dari 9 juta konten bermuatan kebencian yang berhasil dihapus. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari platform untuk menangani isu ini, volume penyebaran ujaran kebencian terus meningkat. Jika tidak ada upaya serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, maka potensi polarisasi sosial dan konflik berbasis identitas akan semakin besar.

Dalam menghadapi realitas tersebut, penting untuk mendorong pengembangan kesadaran kewargaan digital yang tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis menggunakan media sosial, tetapi juga mencakup nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Konsep *digital citizenship* yang dikembangkan oleh Mike Ribble menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Ribble menguraikan sembilan elemen kewargaan digital yang mencakup akses digital, komunikasi, literasi, etika, hukum, keamanan, hak dan tanggung jawab, serta kesehatan digital. Keseluruhan elemen tersebut mendorong individu untuk menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan konstruktif. Lebih lanjut, pendekatan kritis yang ditawarkan oleh Paulo Freire dapat dijadikan landasan dalam memahami dan mengatasi praktik diskriminasi di dunia digital. Konsep kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang dikemukakan Freire mengajarkan pentingnya memahami ketidakadilan sosial melalui refleksi mendalam dan tindakan transformatif. Dalam konteks media sosial, ini berarti mendorong setiap individu untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif dari informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang mampu mengenali, menolak, dan melawan narasi-narasi intoleransi melalui partisipasi bermakna dan empatik. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana transformasi kesadaran kewargaan di era digital dapat memainkan peran penting dalam menanggulangi rasisme di media sosial.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana pemahaman serta penerapan kewargaan digital yang reflektif dan dilandasi oleh nilai-nilai keadilan sosial dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang toleran dan mampu menerima keberagaman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan

pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap sejumlah insiden rasisme di media sosial Indonesia. Dari sana, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, merespons isu-isu diskriminatif yang muncul di ruang digital. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam membangun budaya digital yang lebih sehat dan berkeadaban. Artikel ini juga mengajak pembaca untuk memandang media sosial sebagai ruang yang potensial untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan memperkuat solidaritas lintas identitas. Dalam ruang ini, setiap individu memiliki peran penting sebagai agen perubahan, baik melalui konten yang dibagikan, sikap yang ditunjukkan, maupun cara berinteraksi dengan sesama pengguna. Hanya dengan kesadaran kolektif yang tinggi dan semangat kebersamaan, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan digitalisasi dan meretas jalan menuju tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh S. Santos (2020), mengungkap berbagai temuan penting terkait dengan pola penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Di antara aspek yang dikaji adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan, persepsi publik terhadap ujaran kebencian, serta jenis-jenis ujaran kebencian yang kerap muncul di dunia maya. Bentuk-bentuk ujaran tersebut mencakup pelecehan seksual secara daring dan tindakan *body shaming*, yakni penghinaan terhadap bentuk atau penampilan fisik seseorang. Sementara itu, dalam kajian K. Amin (2018), menyoroti bahwa meningkatnya frekuensi ujaran kebencian dan praktik rasisme di media sosial tidak dapat dilepaskan dari adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi informasi dengan tingkat literasi digital masyarakat. Ketika teknologi canggih digunakan oleh individu atau kelompok yang belum memahami nilai-nilai moral dan etika digital, maka risiko penyalahgunaan teknologi menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat merugikan banyak pihak.

Ameliana Rosanda (2025), menambahkan bahwa strategi pendidikan yang menekankan penguatan nilai-nilai nasionalisme, dialog lintas budaya, serta keterlibatan aktif komunitas sekolah terbukti efektif dalam membangun ketahanan individu terhadap penyebaran ideologi radikal. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan strategis dalam membentuk masyarakat yang terbuka terhadap keberagaman dan hidup rukun, sekaligus menjaga keutuhan nasional di tengah tantangan ideologis yang terus berkembang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti dan rekan-rekannya (2025), dijelaskan bahwa peran warga negara Indonesia dalam era globalisasi mengalami proses

transformasi yang terus berlangsung. Untuk mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi.

Temuan dari Muyasaroh dan Najjicha (2023), juga menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran signifikan dalam mendistribusikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kewarganegaraan. Meski demikian, penyebaran informasi yang tidak akurat serta perdebatan tajam yang bersifat provokatif sering kali menjadi hambatan dalam proses pendidikan kewarganegaraan yang sehat dan konstruktif. Oleh sebab itu, mereka menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar media sosial dapat digunakan secara bijak sebagai sarana pembelajaran kewarganegaraan yang adaptif dalam era digital dan global. Selanjutnya, kajian dari Saddam (2012) dalam *Elementary School Teacher Journal*, menyoroti maraknya kejahatan siber, khususnya perundungan di ruang digital, sebagai ancaman serius terhadap kondisi psikologis korban dan stabilitas sosial masyarakat. Kajian ini merekomendasikan pengintegrasian nilai-nilai budaya digital ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan materi Wawasan Nusantara sebagai pendekatan positif dalam membentuk karakter bangsa.

Nilai-nilai tersebut mencakup pentingnya etika dalam komunikasi digital, yang diyakini mampu mendorong terbentuknya interaksi daring yang lebih sehat dan produktif. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai toleransi, terutama bagi generasi muda, dengan berlandaskan pada Wawasan Nusantara guna membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang menghargai keberagaman dalam ruang digital. Sejalan dengan itu, menjawab tantangan abad ke-21, lembaga pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah dituntut untuk mengembangkan budaya literasi digital dalam proses pembelajaran. Umayah, Mawan, dan Riwanto (2020) menekankan bahwa penerapan literasi digital bertujuan membentuk karakter peserta didik yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta kompetitif di tingkat global. Oleh karena itu, materi ajar dan metode pembelajaran perlu disesuaikan agar dapat menjawab kebutuhan zaman, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Bainus, dan Herdiansah (2022) juga memberikan kontribusi penting dalam wacana ini, khususnya dalam mengkaji aktivitas politik digital kelompok tertentu. Studi tersebut menyoroti keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan separatisme dan terorisme di wilayah Papua. Melalui demonstrasi yang menampilkan simbol-simbol

kemerdekaan Papua, AMP diduga terhubung dengan kelompok elit pro-demokrasi di Papua dan memanfaatkan strategi komunikasi digital yang terstruktur melalui media sosial. Dalam hal ini, penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, serta institusi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan aktif guna mencegah penyebaran gerakan separatis berbasis media digital yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus, sebagaimana diuraikan oleh Yin (2014). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks serta berakar pada konteks tertentu, dalam hal ini respons masyarakat Indonesia terhadap isu rasisme yang berkembang di media sosial dalam kurun waktu satu hingga dua tahun terakhir. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengkaji dinamika sosial secara komprehensif, menelusuri interaksi antar pengguna media digital, serta memahami proses terbentuknya kesadaran sebagai warga digital di tengah persaingan narasi terkait ras, identitas, dan toleransi di ruang daring. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap berbagai perspektif yang muncul di media sosial, baik dari sudut pandang individu maupun komunitas kolektif. Penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan bentuk ujaran kebencian atau diskriminasi berbasis ras, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana masyarakat merespons, baik dengan melawan, mendukung, atau membiarkan narasi-narasi tersebut berkembang. Fokus utama terletak pada bagaimana proses reflektif kewargaan digital tumbuh dan dimobilisasi melalui media sosial sebagai bagian dari lanskap sosial masyarakat digital kontemporer.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang kaya dan relevan, digunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Analisis Konten Media Sosial

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari platform media sosial seperti X (dahulu Twitter), Instagram, dan Facebook. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri kata kunci relevan seperti “rasisme”, “intoleransi”, “Papua”, serta berbagai tagar yang pernah menjadi perbincangan luas seperti

#PapuaBukanMonyet dan #TolakRasisme. Analisis tidak hanya terbatas pada konten berbasis teks, tetapi juga mencakup elemen visual seperti gambar, video, serta bentuk interaksi digital seperti komentar, retweet, dan reaksi pengguna. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengamati dan memetakan pola-pola narasi dominan maupun alternatif dalam ruang digital. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada bagaimana wacana perlawanan terhadap rasisme dikonstruksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh pengguna, serta bagaimana narasi tandingan intoleransi berusaha menegaskan posisinya di tengah wacana publik.

b. Studi Literatur

Selain data primer, penelitian ini juga diperkuat oleh telaah pustaka yang mendalam. Literatur yang dikaji mencakup teori-teori tentang kewargaan digital (*digital citizenship*), kesadaran kritis, serta toleransi sosial, disertai temuan-temuan dari studi sebelumnya terkait rasisme digital dan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat di media sosial. Studi pustaka ini berfungsi sebagai dasar teoretis yang kokoh dan menjadi acuan dalam menafsirkan data, sekaligus memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami fenomena sosial yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu metode yang berfokus pada pengidentifikasian dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Tema yang ditelaah mencakup pola narasi rasisme, bentuk perlawanan digital, keterlibatan publik dalam diskursus daring, serta nilai-nilai kewargaan yang diperjuangkan melalui media sosial. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: dimulai dari proses koding awal terhadap data mentah, dilanjutkan dengan pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, dan diakhiri dengan interpretasi tematik yang dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan. Dua teori utama yang dijadikan rujukan dalam analisis ini adalah:

- a. Teori Digital Citizenship (Ribble, 2011), yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan produktif sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat secara digital.
- b. Teori Kesadaran Kritis (Freire, 1970), yang menekankan perlunya refleksi mendalam dan tindakan transformatif dalam menghadapi ketimpangan struktural, termasuk yang terjadi di dunia digital sebagai ruang diskusi dan pembelajaran sosial.

Dengan menggunakan analisis tematik, penelitian ini bertujuan menjelaskan proses pembentukan wacana kewargaan digital, cara individu dan komunitas menunjukkan kepedulian terhadap isu rasisme, serta bagaimana media sosial menjadi medium strategis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan solidaritas lintas etnis di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berhasil mengungkap lima temuan utama yang merepresentasikan dinamika kesadaran kewargaan digital dalam menghadapi isu rasisme yang berkembang di media sosial Indonesia. Kelima temuan tersebut menunjukkan tidak hanya bagaimana masyarakat bereaksi terhadap insiden diskriminatif, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran sosial, solidaritas antarkelompok, serta partisipasi digital secara aktif membentuk ruang publik yang dinamis. Kesadaran kewargaan digital dalam konteks ini muncul sebagai respons kritis terhadap tantangan sosial yang dihadapi di ruang maya. Berikut uraian mendalam mengenai lima temuan tersebut:

Munculnya Narasi Tandingan (*counter-narratives*)

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah ditemukannya narasi tandingan (*counter-narratives*) yang muncul sebagai respons terhadap berbagai pernyataan dan konten bernuansa rasis yang tersebar di media sosial. Narasi ini tidak bersifat destruktif atau sekadar reaktif, melainkan dibangun secara konstruktif dan edukatif. Tujuan utamanya adalah untuk menanggapi informasi yang keliru, memperbaiki citra kelompok yang terdiskriminasi, serta memberikan edukasi publik tentang pentingnya toleransi dan inklusi sosial. Narasi tandingan ini sering kali lahir dari individu atau kelompok yang memiliki kesadaran kritis tinggi di antaranya para aktivis HAM, akademisi, jurnalis independen, serta anggota komunitas yang terdampak langsung, seperti masyarakat Papua. Mereka memanfaatkan media sosial untuk memproduksi berbagai bentuk konten informatif seperti thread Twitter, infografik yang menyajikan data, video pendek yang menyuarakan pengalaman nyata, hingga testimoni pribadi yang menggugah empati. Secara strategis, narasi tandingan ini berfungsi sebagai upaya dekonstruksi terhadap stereotip rasial yang selama ini mengakar dalam wacana publik. Dengan memproduksi narasi yang bersifat emansipatoris, masyarakat digital turut membongkar dominasi pandangan diskriminatif, serta memperluas ruang dialog yang lebih adil dan manusiawi.

Transformasi Respons Individu Menjadi Gerakan Kolektif

Temuan kedua menunjukkan bahwa partisipasi dalam isu rasisme di media sosial tidak terbatas pada tindakan individu. Banyak reaksi awal yang bersifat personal, seperti unggahan status atau komentar yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial digital yang kolektif. Transformasi ini menunjukkan bagaimana media sosial berperan sebagai katalisator bagi aktivisme digital (*digital activism*). Gerakan kolektif ini terwujud melalui berbagai bentuk, antara lain kampanye tagar seperti #PapuaLivesMatter, #TolakRasisme, hingga petisi daring dan pelaporan masif terhadap akun atau konten yang dianggap rasistis. Lebih lanjut, aksi-aksi digital ini sering dilanjutkan dengan kegiatan offline seperti diskusi publik, penggalangan dana, atau demonstrasi yang menunjukkan keterkaitan erat antara ruang daring dan dunia nyata. Yang menarik, solidaritas yang terbentuk tidak hanya datang dari kelompok etnis yang terdiskriminasi, tetapi juga melibatkan berbagai latar belakang masyarakat. Solidaritas lintas komunitas ini mencerminkan adanya pemahaman kolektif bahwa ketidakadilan rasial adalah persoalan bersama yang menuntut keberpihakan moral. Ini menjadi indikator penting tumbuhnya kewargaan digital yang reflektif dan aktif.

Pengaruh Figur Digital dan Media Alternatif dalam Menyuarakan Toleransi

Peran publik figur di media sosial, seperti influencer, aktivis digital, dan kreator konten edukatif, juga terbukti signifikan dalam membentuk opini publik terkait isu rasisme. Mereka berperan sebagai jembatan antara isu-isu kompleks dengan khalayak luas, yang sering kali belum memiliki akses atau pemahaman terhadap dinamika diskriminasi rasial di Indonesia. Para publik figur ini biasanya memiliki pengikut yang besar, yang menjadikan pesan mereka tersebar dengan cepat. Konten yang mereka hasilkan tidak hanya mengandung dukungan moral bagi korban rasisme, tetapi juga edukasi yang menyentuh aspek hukum, sejarah kolonialisme, hingga nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan hak asasi manusia. Selain itu, media alternatif seperti kanal YouTube independen, podcast kritis, dan blog komunitas juga memainkan peran vital dalam menyuarakan isu-isu yang kurang mendapat perhatian dari media arus utama. Mereka menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan berorientasi pada keadilan sosial. Kehadiran media alternatif ini membuka ruang baru bagi narasi-narasi yang selama ini termarginalkan untuk mendapat tempat dalam diskursus publik nasional.

Heterogenitas Respons Publik

Meskipun terdapat banyak upaya positif dalam merespons isu rasisme, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua masyarakat menunjukkan sikap yang sama. Respons publik terbagi ke dalam tiga kelompok utama:

- a. Respons Progresif, yakni individu atau kelompok yang secara aktif melawan rasisme melalui kampanye, edukasi, atau advokasi di media sosial.
- b. Respons Netral, yang ditunjukkan oleh mereka yang memilih tidak mengambil posisi atau enggan terlibat dalam diskusi, baik karena kurangnya informasi, apatisisme, maupun kekhawatiran akan konflik.
- c. Respons Regresif, yakni mereka yang menanggapi isu rasisme dengan komentar sinis, candaan ofensif, atau bahkan memperkuat ujaran kebencian dan stereotip lama yang diskriminatif.

Keragaman respons ini menunjukkan bahwa kesadaran kewargaan digital di Indonesia masih belum merata. Di satu sisi terdapat kelompok masyarakat yang teredukasi dan responsif, namun di sisi lain masih banyak individu yang belum menyadari pentingnya membela hak-hak kelompok yang terdiskriminasi. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih luas dan berkelanjutan dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial di ruang digital.

Tantangan Polarisasi dan Disinformasi

Meskipun media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi dan perubahan sosial, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang serius. Salah satu tantangan utama adalah polarisasi opini, di mana pengguna media sosial cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, dialog antar pandangan yang berbeda menjadi langka, bahkan nyaris tidak mungkin, sehingga mempersempit ruang debat yang sehat. Tantangan lain yang tak kalah serius adalah penyebaran disinformasi dan hoaks, khususnya terkait isu rasial. Berita palsu, kutipan menyesatkan, atau manipulasi gambar/video sering kali menyebar lebih cepat daripada klarifikasi yang sah. Hal ini diperparah oleh algoritma media sosial yang lebih memprioritaskan konten sensasional ketimbang konten edukatif. Kondisi ini membuat ruang digital rentan terhadap manipulasi, memperbesar ketegangan sosial, dan menghambat terbentuknya konsensus sosial yang berbasis empati dan pemahaman lintas identitas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berkelanjutan yang mencakup penguatan literasi digital, reformasi kebijakan pada platform media sosial, serta kerja sama antara

masyarakat sipil, kalangan akademik, dan pemerintah untuk membangun ruang publik digital yang lebih sehat dan mampu merangkul keberagaman.

Pembahasan

a. Transformasi Kesadaran Kewargaan di Era Digital

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, konsep kewargaan mengalami perubahan mendasar. Jika pada masa lalu kesadaran kewargaan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam pemilu, atau keterlibatan dalam aktivitas kenegaraan formal, maka saat ini kesadaran tersebut telah berevolusi menjadi bentuk yang jauh lebih aktif, reflektif, dan partisipatif. Individu bukan hanya sebagai objek kebijakan atau penerima informasi dari otoritas, tetapi telah menjadi subjek yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah diskursus publik dan bertindak sebagai agen perubahan sosial. Transformasi ini sangat dipengaruhi oleh kehadiran teknologi digital, terutama media sosial. Media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan individu dengan isu-isu global dan lokal secara *real-time*. Dengan hanya menggunakan ponsel pintar, seseorang dapat mengakses berbagai narasi, data, dan kesaksian tentang ketidakadilan yang terjadi di belahan dunia lain, serta meresponsnya secara langsung. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat di berbagai daerah dapat menunjukkan solidaritas terhadap kelompok tertentu yang menjadi korban tindakan diskriminatif atau rasisme, seperti yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Keterhubungan digital juga memperluas batas-batas empati. Seseorang yang tinggal di kota besar seperti DKI Jakarta dapat menunjukkan empati dan dukungan terhadap individu atau komunitas yang menghadapi ketidakadilan sosial di tempat yang jauh, seperti Papua, Maluku, atau daerah lain yang selama ini kurang mendapat perhatian. Fenomena ini mencerminkan munculnya kewargaan digital transnasional, sebuah bentuk kesadaran kewargaan yang tidak lagi terbatas oleh wilayah geografis, melainkan ditandai oleh keterlibatan moral dan sosial terhadap isu kemanusiaan universal.

b. Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru

Dalam perkembangan sosial-politik kontemporer di Indonesia, media sosial telah menjelma menjadi arena diskusi publik yang sangat berpengaruh. Dalam istilah filsuf sosial Jurgen Habermas (1984), ruang publik adalah sebuah arena diskursif di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional mengenai isu-isu bersama tanpa intervensi negara ataupun kekuatan pasar. Media sosial dalam hal ini memiliki potensi

untuk menjadi bentuk baru dari ruang publik tersebut, di mana berbagai kalangan dapat saling bertukar ide, menyampaikan kritik, hingga mengorganisir aksi sosial. Platform seperti X (dahulu Twitter), Instagram, Facebook, dan TikTok memberi kesempatan bagi semua orang tak terbatas usia, status ekonomi, atau latar belakang pendidikan untuk menyuarakan pendapatnya. Ini adalah bentuk dari demokratisasi informasi dan komunikasi. Namun, dalam praktiknya, media sosial tidak selalu menjadi ruang yang ideal. Terdapat sejumlah persoalan struktural yang membayangi perannya sebagai ruang publik digital, seperti polarisasi opini, ujaran kebencian, serta kecenderungan terbentuknya *filter bubbles*, yaitu situasi di mana pengguna hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sesuai dengan preferensi mereka sendiri (Pariser, 2011). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun media sosial membuka peluang untuk partisipasi yang lebih luas, ia juga berpotensi menutup ruang dialog lintas perspektif. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital tetap memiliki peran strategis sebagai medan pertarungan ideologis antara narasi yang eksklusif dan intoleran dengan narasi-narasi alternatif yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan menghormati keberagaman.

c. Dari Toleransi Pasif ke Toleransi Aktif

Perubahan bentuk kesadaran kewargaan juga tampak dalam praktik toleransi yang terjadi di ruang digital. Jika sebelumnya toleransi sering dipahami sebagai sikap pasif, cukup dengan tidak mengganggu atau mencampuri keberadaan kelompok lain. Maka, kini mulai berkembang toleransi aktif. Dalam toleransi aktif, warga digital menunjukkan kepedulian yang lebih konkret, seperti menyuarakan dukungan terhadap korban diskriminasi, membagikan konten edukatif tentang isu rasial, dan menantang narasi-narasi yang sarat dengan stereotip atau ujaran kebencian. Fenomena ini mencerminkan lahirnya *digital active citizens*, yaitu warga digital yang sadar akan hak dan tanggung jawab sosialnya, serta bersedia mengambil tindakan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebajikan universal seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Konsep ini beririsan dengan gagasan *Digital Citizenship* dari Mike Ribble (2011), yang menekankan pentingnya kompetensi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan sosial. Seorang warga digital yang ideal menurut Ribble adalah mereka yang memiliki literasi teknologi, tanggung jawab moral, dan kesadaran sosial untuk berkontribusi positif di ruang digital. Lebih lanjut, toleransi aktif juga mencerminkan realisasi dari konsep *conscientização* atau kesadaran kritis yang diperkenalkan oleh Paulo Freire (1970). Dalam konteks ini, warga digital yang

menyadari adanya ketimpangan atau ketidakadilan sosial tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi terdorong untuk bertindak baik melalui pendidikan, advokasi, maupun aksi solidaritas.

d. Urgensi Literasi Digital dan Pendidikan Multikultural

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika digital, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital bukan hanya tentang memahami cara menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis, etis, dan empatik dalam menanggapi informasi. Terutama dalam konteks isu rasisme, kemampuan untuk memilah informasi yang benar dari hoaks, memahami konteks sosial dari suatu pernyataan, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti kelompok lain menjadi keterampilan yang esensial. Literasi digital yang kuat harus disertai dengan pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai keragaman budaya, etnis, dan agama merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap toleran. Pendidikan seperti ini tidak cukup diberikan dalam bentuk hafalan nilai atau slogan, tetapi harus dikembangkan melalui pembelajaran kontekstual yang mengajak peserta didik untuk memahami isu-isu nyata di masyarakat, termasuk isu diskriminasi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran HAM. Penelitian Rika (2023) menegaskan bahwa pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan berperan dalam membentuk karakter peserta didik yang terbuka terhadap perbedaan, memiliki empati sosial, serta memiliki keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membekali generasi muda dengan pemahaman lintas budaya serta kemampuan digital yang bertanggung jawab. Namun, hal ini tentu membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mendukung kebijakan pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial. Lembaga pendidikan perlu memperbarui metode dan materi ajar agar sesuai dengan tantangan zaman. Sementara masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra kritis dalam mengawasi dan memperkaya ruang belajar warga, baik secara formal maupun informal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran kewargaan di era digital telah mengalami pergeseran mendalam dari yang semula bersifat pasif menjadi aktif dan reflektif. Media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan warga tidak hanya menanggapi isu, tetapi juga menciptakan dan membentuk narasi sosial. Dalam menghadapi isu rasisme, warga digital menunjukkan kapasitas untuk menjadi agen perubahan melalui produksi narasi tandingan, aktivisme

digital, serta solidaritas lintas komunitas. Namun demikian, media sosial juga menghadirkan tantangan serius seperti disinformasi, polarisasi, dan pembentukan gelembung informasi yang dapat memperkeruh intoleransi. Oleh karena itu, meskipun media digital menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat demokrasi dan toleransi, pengelolaan dan edukasi yang berkelanjutan tetap dibutuhkan agar ruang digital tidak menjadi sarang reproduksi kebencian.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah 1) Penguatan Literasi Digital: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus secara serius memasukkan literasi digital dalam kurikulum formal dan nonformal, dengan fokus tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada etika, empati, dan kemampuan berpikir kritis. 2) Revitalisasi Pendidikan Multikultural: Nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan keadilan sosial perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran kewarganegaraan agar peserta didik mampu menjadi warga digital yang sadar dan toleran. 3) Kolaborasi Antar Sektor: Diperlukan sinergi antara pemerintah, komunitas digital, kalangan akademisi, dan media untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan beretika. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi konten, penanggulangan ujaran kebencian, serta dukungan terhadap narasi yang menjunjung keberagaman dan keadilan sosial. 4) Dukungan terhadap Media Alternatif dan Influencer Positif: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan ruang dan dukungan bagi konten kreator dan media independen yang berkomitmen pada nilai-nilai keberagaman, demokrasi, dan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Restu, et al. (2025). Kewarganegaraan digital sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1).
- Amin, K., Dziqie, M., Alfarauqi, A., & Khatimah, K. (2018). Social media, cyber hate, and racism. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 10(1), 3–10.
- Arif, & Darajat. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3).
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (Vol. 1: Reason and the rationalization of society). Beacon Press.
- Harri Romadhona, et al. (2023). Transformasi sosial dan perubahan politik di era digital serta dampaknya terhadap partisipasi kewarganegaraan. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 1(3).

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, & GNLD Siberkreasi. (2021). *Modul literasi digital Indonesia: Etis bermedia digital*.
- Mahpudz, A. (2024). Penguatan pembelajaran toleransi: Solusi alternatif menyiapkan warganegara global di era digital. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 26–37. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.6773>
- Muyasaroh, J., & Najicha, F. U. (2023). Transformasi pendidikan kewarganegaraan: Eksplorasi peran dan dampak media sosial pada siswa dalam konteks globalisasi. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Pranata, F. W., Bainus, A., & Herdiansah, A. G. (2022). Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melalui media sosial pada kerusuhan demonstrasi anti rasis tahun 2019. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39586>
- Ribble, M. (2011). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*. ISTE.
- Richter, F. (2020). Infographic: Facebook ramps up efforts against hate speech. *Statista*. <https://www.statista.com/chart/21704/hate-speech-content-removed-by-facebook/>
- Rika Kurnia, et al. (2023). Integrasi nilai karakter dalam pembelajaran pada kurikulum sekolah. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Rosanda, A., Pamungkas, A., Putri, A. D., Haliza, I., Winda, P., & Unggul, U. E. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme: Membangun kesadaran kewarganegaraan; strategi pendidikan dalam melawan radikalisme. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_1059/36891/dalam-konteks-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-ppkn-jelaskan-hubungan-antara-konsep-nilai-moral-dan-norma-dengan-tuntutan-perilaku-warga-negara
- Saddam, Maemunah, Rahmandari, I. A., & A. A. (2012). Membangun karakter bangsa melalui digital culture: Peran pendidikan kewarganegaraan dan wawasan nusantara dalam menghadapi tantangan perundungan siber. *Elementary School Teacher Journal*, 7(1), 29–38.
- Sandrina, G., et al. (2024). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 79–85.
- Santos, S., Amaral, I., & Simões, R. B. (2020). Hate speech in social media: Perceptions and attitudes of higher education students in Portugal. *INTED2020 Proceedings*, 1(March), 5681–5686. <https://doi.org/10.21125/inted.2020.1533>
- Siti, M., et al. (2025). Transformasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Media Akademik*, 3(1).

*Peran Transformasi Kesadaran Kewargaan di Era Globalisasi Digital dalam Membangun Masyarakat Toleran
(Studi Kasus Respons terhadap Isu Rasisme di Media Sosial)*

Umayah, U., & Riwanto, M. A. (2020). Transformasi sekolah dasar abad 21: New digital literacy untuk membangun karakter siswa di era global. *Jurnal PANCAR (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar)*, 4(1), 1–10.
<http://ejournal.unugha.ac.id/index.php/pancar/article/view/308>

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.